

**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018**



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2019

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang setelah dilakukan verifikasi telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang; (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028; (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018; (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana di maksud pada diktum KESATU memuat ;
1. Program dan Kegiatan;
 2. Lokasi Kegiatan;
 3. Indikator Kinerja;
 4. Kelompok sasaran;
 5. Pagu Indikatif dan perkiraan maju
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suasana keterbukaan dan reformasi di negara kita telah menuntut semua pihak khususnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang dapat memfasilitasi masyarakat guna mewujudkan suatu keadaan yang kondusif dan bernilai sebagai suatu perubahan yang pada gilirannya akan sangat diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dan hal ini adalah merupakan komitmen awal pada pendiri Republik ini. Komitmen tersebut sudah jelas tertuang dalam dasar Negara kita yakni Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan kebutuhan individu dan kebutuhan pada umumnya di setiap lingkungan sehingga pemenuhannya tidak dapat dianggap remeh. Oleh sebab itu pembangunan manusia seutuhnya dalam upaya menjaga Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Enrekang tetap terkendali.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini bukan hanya di lingkungan saja melainkan di wilayah NKRI pada umumnya. Penduduk Kabupaten Enrekang menghendaki keadaan aman dan tertib dipertahankan dengan di dukung oleh aparat yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan di dukung oleh dana/ sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam hal ini kemampuan para aparatur untuk merencanakan melaksanakan dan mengawasi serta mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diinginkan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dan dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai

dasar dan acuan untuk membentuk dan melaksanakan Otonomi Daerah dengan diberikan hak oleh Negara dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.

Dengan Undang-Undang tersebut telah memberi peluang seluas-luasnya untuk mengambil keputusan sebagai langkah dalam meletakkan kebijakan pembangunan sesuai keadaan dan kondisi serta kebutuhan di daerah yang bersifat strategis.

Sesuai dan seiring dengan tuntutan era reformasi sekarang ini, maka pemerintah daerah diharapkan lebih bersungguh-sungguh dan disertai semangat yang tinggi untuk menetapkan kebijakan yang tepat dalam rangkai pelaksanaan program/kegiatan dan tugas pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan rencana kerja yang akan dijadikan sebagai acuan (patron) oleh semua pihak yang terkait dalam seluruh proses pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rujukan utama dalam pengurusan Rencana Kerja dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012;
5. Peraturan Dalan Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang yang merupakan penjabaran dari agenda, kebijakan yang tertuang dalam RPJM 2014-2018.

Secara umum, maksud penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan Konsistensi dan Sinkronisasi Perencanaan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi serta indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program/ kegiatan tahun depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2019

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja, proses penyusunan Rencana Kerja, kedudukan Rencana Kerja

tahunan, rencana dalam dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD 2019.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun yang direncanakan.

1.4. Sistematika Rencana Kerja

Mengemukakan sistematika Rencana Kerja terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkasan isi dari setiap BAB.

BAB. II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Rencana Strategis)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Memuat Uraian Mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja dan hasil kritis yang terkait dengan pelayanan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Formulasi isu-isu penting berupa dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Memuat Uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2. Menjelaskan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1.** Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang.
- 3.2.** Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB. IV PENUTUP

Berisikan Uraian penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Enrekang

Program dan Kegiatan yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018, semuanya terealisasi. Berikut tampilan program dan kegiatan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Apel Siaga, terealisasi 100 % selama 5 tahun yang di rencanakan.
 - b. Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Hansip/Linmas, terealisasi 100 % selama 5 tahun yang di rencanakan.
 - c. Pembinaan Mental dan Karakter bagi Anggota Satpol PP, terealisasi 100 % selama 4 tahun yang direncanakan.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah terealisasi 100 % selama 2 tahun direncanakan.
 - b. Penegakan Perda (Pajak Rokok) terealisasi 100 % selama 5 tahun yang di rencanakan.
 - c. Pengamanan/Patroli Wilayah dan Penegakan Perda terealisasi 100 % selama 5 tahun yang di rencanakan.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - a. Pelatihan pengendalian massa (Dalmas) bagi Satpol PP, terealisasi 100 % selama 5 tahun yang di rencanakan.
4. Program Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a. Pelatihan Linmas Dalam Penanggulangan Bencana Alam terealisasi 100% selama 2 Tahun yang direncanakan.
 - b. Pos Komando Operasional Pemadam Kebakaran, terealisasi 100 % selama 2 tahun yang di rencanakan.

- c. Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Damkar, terealisasi 100 % selama 2 Tahun yang di rencanakan.
- d. Pengadaan Perlengkapan Petugas Damkar, terealisasi 100 % selama 2 tahun yang direncanakan.

Dalam tabel berikut ditampilkan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang dan Pencapaian Renstra Sampai Tahun 2018.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun 2018
Kabupaten Enrekang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (Outcome)/Keluaran Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan (Jangka Menengah 2014-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014 (Tahun n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RPKD Tahun Berjalan 2018 (Tahun n-5)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d tahun berjalan		SKPD Peranggung Jawab
					Target RPKD Tahun 2015 (Tahun n-1)	Realisasi RPKD Tahun 2015 (Tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d thn berjalan (2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d 2018 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.01.05.01.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1.01.05.01.05	Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1.01.05.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja										
1.01.05.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	terciptanya ketertarikan dan ketertiban masyarakat									Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
1.01.05.01.15.05	1. Pergerakan Kenyamanan Lingkungan	terwujudnya kondisi keamanan & kenyamanan lingkungan yg kondusif	60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%	Kebakaran
1.01.05.01.15.11	2. Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil / Linmas	Adanya partisipasi aktif aparat harsip linmas	60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%	
1.01.05.01.15.12	3. Pembinaan Mental dan Karakter bagi Anggota Satpol PP	Terlaksananya Pemilihan Gubernur Yang Aman & Lancar	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%	
1.01.05.01.16	Program Pemeliharaan Kantintribmas & Pencegahan Tindak Kriminal	terwujudnya ketertarikan dan ketertiban masyarakat									
1.01.05.01.16.04	1. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Sistemswakarsa di Daerah	Terwujudnya Sistemswakarsa di Daerah	24 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	100%	
1.01.05.01.16.08	2. Penegakan Perda (Pajak Rokok)	Terlaksananya Penegakkan Perda	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 Bulan	100%	
1.01.05.01.16.13	3. Pengamanan/Patrol Wilayah & Penegakan Perda	Terciptanya Penegakan Perda	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 Bulan	100%	

1	01	05	01	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan													
1	01	05	01	19	03	1. Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) bagi Satpol PP	terlatihnya aparat Satpol PP dalam mengendalikan massa	60 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 Bulan	100%			
1	01	05	01	23	Program Pencegahan Ke siapsiagaan Terhadap Bencana	Tumbuhnya kesadaran berpolitik di masyarakat												
1	01	05	01	23	01	1. Pelatihan Linmas dalam Penanggulangan Bencana Alam	Meningkatnya Keterampilan Linmas dalam menangani Penanggulangan Bencana	24 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	100%			
1	01	05	01	23	02	2. Pos Komando Operasional Pemadam Kebakaran	Tersedianya Kebutuhan Pos Komando Operasional Pemadam Kebakaran	24 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	100%			
1	01	05	01	23	05	3. Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Damkar	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Damkar	24 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	100%			
1	01	05	01	23	06	4. Pengadaan Perlengkapan Petugas Damkar	Tersedianya Perlengkapan Petugas damkar	24 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berikut ini merupakan indikator kinerja pelayanan. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Angka Kriminilitas Per 10.000 Penduduk tercapai 7.67 % dari target 7.67 %.
2. Rasio Pol PP Per 10.000 Penduduk tercapai 10.87% dari target 10.87%.
3. Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk tercapai 41.13% dari target 41.13%.
4. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai standar yang ada tercapai 100% dari target 100%.
5. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Saprass Dasar Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan) tercapai 90% dari target 90 %.
6. Tingkat Keseragaman Pakaian Dinas Aparatur tercapai 100% dari target 100 %.
7. Tingkat Kompetensi Aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi tercapai 85% dari target 85 %.
8. Tingkat Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang dipersyaratkan 100% tercapai dari target 100%.
10. Jumlah Dokumen Penganggaran yang diterbitkan tercapai 4 Dokumen tercapai dari target 4 Dokumen.

Untuk lebih jelasnya, dalam tabel 2.2 berikut dipaparkan mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.

Tabel 2.2												
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran												
Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan												
No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisis
				2015	2016	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Kriminal Per 10.000 Penduduk		9.05%	8.30%	8.02%	7.79%	7.67%	7.79%	7.67%	7.79%	7.67%	
2	Rasio Pol PP Per 10.000 Penduduk		7.89%	8.29%	8.71%	8.91%	10.87%	8.91%	10.87%	8.91%	10.87%	
3	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk		38.31%	39.32%	39.54%	40.54%	41.13%	40.54%	41.13%	40.54%	41.13%	
4	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai standar yang ada		80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Saprass yang dasar perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan)		75%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
6	Tingkat Keseragaman Pakaian Dinas Aparatur		80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
7	Tingkat Kompetensi Aparatur sesuai Tugas Pokok & Fungsi		75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
8	Tingkat Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang di		85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejauh ini, kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang cukup baik. Ini ditandai dengan tidak adanya komplain dari masyarakat tentang kinerja pelayanan kantor selama ini. Walaupun demikian bukan berarti kami tidak mendapat permasalahan dan hambatan di lapangan. Berikut kami paparkan permasalahan dan hambatan berikut:

1. Adanya kendaraan operasional (PATWAL) yang kurang layak digunakan.
2. Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi di Bidang Ketentraman Ketertiban dan Masyarakat
3. Masih kurangnya staf.
4. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kegiatan kantor.

Selain hambatan internal, berikut isu-isu strategis yang menyangkut penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

1. Adanya pencurian kendaraan roda 2 dan roda 4.
2. Adanya isu penculikan anak di tahun 2014.

Selain isu-isu diatas status Kantor yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga merupakan hambatan tersendiri karena mempunyai beban kerja yang sama dengan Dinas-Dinas di Kabupaten.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam tabel berikut, disajikan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 (Tabel 2.4)

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
	1. Pengendalian Kenyamanan Lingkungan	Wil. Ekg	- terlaksananya pengendalian kenyamanan lingkungan	12 Bln	1,300,000,000	1. Pengendalian Kenyamanan Lingkungan	Wil. Ekg	- terlaksananya pengendalian kenyamanan lingkungan	12 Bln	1,430,000,000	
	2. Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil serta Personil Hansip/Linmas	Wil. Ekg	- adanya partisipasi aktif petugas Hansip/ Linmas di Kab. Enrekang	12 Bln	154,000,000	2. Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil serta Personil Hansip/Linmas	Wil. Ekg	- adanya partisipasi aktif petugas Hansip/ Linmas di Kab. Enrekang	12 Bln	169,400,000	
	3. Pembinaan Mental dan Karakter bagi Anggota Satpol PP	Wil. Ekg	- terbinaanya Mental dan Karakter bagi Anggota Satpol PP	12 Bln	66,000,000	3. Pembinaan Mental dan Karakter bagi Anggota Satpol PP	Wil. Ekg	- terbinaanya Mental dan Karakter bagi Anggota Satpol PP	12 Bln	72,600,000	
4. Pembangunan Pos Kamling	Wil. Ekg	- Adanya Pos Kamling/Ronda	12 Bln	181,000,000	4. Pembangunan Pos Kamling	Wil. Ekg	- Adanya Pos Kamling/Ronda	12 Bln	199,100,000		
2	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat			Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat			
	1. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sistemswakarsa di Daerah	Wil. Ekg	Terciptanya Keamanan yang memadai		71,500,000	1. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sistemswakarsa di Daerah	Wil. Ekg	Terciptanya Keamanan yang memadai		78,660,000	
2. Penegakan Perda (Pajak Rokok)	Wil. Ekg	Terciptanya Penegakan Perda	12 Bln	500,000,000	2. Penegakan Perda (Pajak Rokok)	Wil. Ekg	Terciptanya Penegakan Perda	12 Bln	550,000,000		
3. Pengamanan/Patrol Wilayah dan Penegakan Perda	Wil. Ekg	Terlaksananya Pengamanan/Patrol Wilayah dan Penegakan Perda	12 Bln	247,500,000	3. Pengamanan/Patrol Wilayah dan Penegakan Perda	Wil. Ekg	Terlaksananya Pengamanan/Patrol Wilayah dan Penegakan Perda	12 Bln	272,250,000		
4. Penyuluhan Pencegahan Berkenbangnya Praktek Prostitusi		Untuk Mencegah Terjadinya Tindakan Asusila		82,500,000	4. Penyuluhan Pencegahan Berkenbangnya Praktek Prostitusi		Untuk Mencegah Terjadinya Tindakan Asusila		90,750,000		
5. Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	Wil. Kab	Berkurangnya Tindak kriminal	12 Bln	82,500,000	5. Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	Wil. Kab	Berkurangnya Tindak kriminal	12 Bln	90,750,000		

3	Program Pem berdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					Program Pem berdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
	1. Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) bagi Satpol PP	Wil. Kab	- Terlatihnya aparat Satpol PP dalam mengendalikan massa	12 Bln	66,000,000	1. Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) bagi Satpol PP	Wil. Kab	- Terlatihnya aparat Satpol PP dalam mengendalikan massa	12 Bln	72,600,000	
4	Program Pencegahan Ke siapsiagaan Terhadap Bencana		Terwujudnya Ke siapsiagaan Terhadap Bencana			Program Pencegahan Ke siapsiagaan Terhadap Bencana		Terwujudnya Ke siapsiagaan Terhadap Bencana			
	1. Peningkatan Keterampilan Linmas Penganggulangan Bencana Alam	Wil. Kab	Meningkatnya Keterampilan Linmas dalam Menangani Penanggulangan Bencana	12 Bln	44,000,000	1. Peningkatan Keterampilan Linmas Penganggulangan Bencana Alam	Wil. Kab	Meningkatnya Keterampilan Linmas dalam Menangani Penanggulangan Bencana	12 Bln	48,400,000	
	2. Pos Komand Operasional Pemadam Kebakaran	Wil. Kab	Tersedianya Kebutuhan Pos Komando Operasional Pemadam kebakaran	12 Bln	220,000,000	2. Pos Komand Operasional Pemadam Kebakaran	Wil. Kab	Tersedianya Kebutuhan Pos Komando Operasional Pemadam kebakaran	12 Bln	242,000,000	
	3. Pengadaan Peralatan Kerja Personil i Petugas Damkar	Wil. Kab	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Damkar	12 Bln	99,000,000	3. Pengadaan Peralatan Kerja Personil i Petugas Damkar	Wil. Kab	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Damkar	12 Bln	108,900,000	
	4. Pengadaan Perlengkapan Kerja Personil Petugas damkar	Wil. Kab	Tersedianya Perlengkapan Petugas Damkar	12 Bln	126,500,000	4. Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas damkar	Wil. Kab	Tersedianya Perlengkapan Petugas Damkar	12 Bln	139,150,000	
	5. Peningkatan Keterampilan bagi Petugas Tingkat SKPD dalam antisipasi Kebakaran dan Penyelamatan Korban	Wil. Kab	Tercapainya Peningkatan Keterampilan Petugas	12 Bln	44,000,000	5. Pengadaan Perlengkapan Petugas Damkar Tingkat SKPD dalam antisipasi Kebakaran dan Penyelamatan Korban	Wil. Kab	Tercapainya Peningkatan Keterampilan Petugas	12 Bln	48,400,000	
	6. Diklat Pemadaman Kebakaran dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran	Wil. Kab	Tercapainya Pemahaman Petugas Damkar Dalam Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran	12 Bln	60,500,000	6. Diklat Pemadaman Kebakaran dan Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran	Wil. Kab	Tercapainya Pemahaman Petugas Damkar Dalam Pengoperasian Alat Pemadam Kebakaran	12 Bln	66,550,000	
	7. Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran	Wil. Kab	Terlaksananya Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran	12 Bln	49,500,000	7. Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran	Wil. Kab	Terlaksananya Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran	12 Bln	54,450,000	
	8. Diklat Fire Rescue Petugas Pemadam Kebakaran	Wil. Kab	Tercapainya Pergetahuan Fire Rescu Petadam Kebakaran	12 Bln	44,000,000	8. Diklat Fire Rescue Petugas Pemadam Kebakaran	Wil. Kab	Tercapainya Pergetahuan Fire Rescu Petadam Kebakaran	12 Bln	48,400,000	
	<i>Jumlah</i>				<i>3,438,500,000</i>	<i>Jumlah</i>				<i>3,782,350,000</i>	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam hal ini maka tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan transparan yang berbasis pada partisipasi aktif, kreatif serta kemandirian masyarakat dengan dasar moral hukum dalam wadah Negara Kesatuan RI.
2. Memberi pelayanan yang mantap kepada setiap kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada ketentraman, ketertiban umum, penyidikan, perizinan dan perlindungan masyarakat.
3. Memelihara dan melestarikan heterogenitas masyarakat.
4. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dan memelihara kewaspadaan Nasional.
5. Memberi perlindungan kepada masyarakat yang berorientasi pada pengayoman, rasa aman dan memelihara persatuan dan kesatuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Mencitakan keamnan dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat
2. Terwujudnya kesadaran hukukm dalam rangka pelaksanaan aktivitas dalam masyarakat.

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam Tabel berikut ini dipaparkan program dan kegiatan, pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Keg	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					1/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.0.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1.0.01.0.05	Keterampilan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja														
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)									2.771.950.000,-	3.049.145.000,-		
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			Kab. ENREKANG			Tersedianya Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	12 Bulan	Tertujuhnya Aktifitas dan Operasional Kantor	12 Bulan	44.000.000,-	48.400.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. ENREKANG			Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor	12 Bulan	27.000.000,-	29.700.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Kab. ENREKANG			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tertujuhnya Aktifitas dan Operasional Kantor	12 Bulan	8.250.000,-	8.075.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. ENREKANG			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya Informasi dan Pengetahuan Staf	12 Bulan	71.500.000,-	78.650.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kab. ENREKANG			Adanya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Pelaksanaan Tipologi Berjalan dengan baik	12 Bulan	401.500.000,-	441.650.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.2	Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah & Peninjauan Lapangan			Kab. ENREKANG			Adanya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Pelaksanaan Tipologi Berjalan Efektif	12 Bulan	346.500.000,-	381.150.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.21	Pengelolaan Administrasi Keuangan & Perkantoran			Kab. ENREKANG			Tertertolanya Administrasi Keuangan dan Perkantoran	12 Bulan	Tertujuhnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran dengan baik	12 Bulan	1.060.000.000,-	2.046.000.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.01.0.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor			Kab. ENREKANG			Tersedianya sarana kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	12 Bulan	Terperuhnya Peralatan dapur dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	13.200.000,-	14.520.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-laki Perempuan (M3)									810.750.000,-	1.001.825.000,-		
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.02.0.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	Lancarnya Kegiatan Operasional Pol PP	1 Unit	821.500.000,-	883.650.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.02.0.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah Perlengkapan/Peralatan kantor yang diadkan	6 Buah	Tertujuhnya Aktifitas Perkantoran	6 Buah	50.000.000,-	55.000.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.02.0.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor						Terperuhnya Gedung Kantor	12 Bulan	Tertujuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	19.250.000,-	21.175.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.02.0.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Bulan	Tertujuhnya aktifitas dan Operasional Kantor	12 Bulan	203.500.000,-	223.850.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	
1.0.01.0.05.1.01.05.01.00.0.02.0.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor						Terperuhnya Gedung Kantor	12 Bulan	Tertujuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	16.500.000,-	18.150.000,-	Satuan Polisi Pamong Praja	1	

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dirumuskan dan disusun sebagai pedoman, patron dan arah dalam melaksanakan serta menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Enrekang.

Sangat disadari bahwa keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat tergantung pada ketaatan terhadap rumusan yang telah dituangkan dalam rencana kerja ini disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi semua pihak, utamanya pimpinan selaku pelaku pengambil kebijakan baik yang menyangkut personil, sarana dan prasaran serta operasional di lapangan.

Teramat disadari bahwa rencana kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, oleh karenanya dalam kaitan ini sangat terbuka dan menerima masukan yang sifatnya konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan dan atas berbagai masukan dan sumbangsih pemikiran dari manapun datangnya dihaturkan banyak Terima kasih

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

